

**DIPLOMASI KEAMANAN INDONESIA TERHADAP REZIM
INTERNASIONAL ICAO: STUDI KASUS KAWASAN
PERBATASAN BATAM PERIODE 2022-2025**

***Manda Putri Awlia¹, Alfajri²**

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

*Email Korespondensi: mandaputriawlia764@student.uir.ac.id

ABSTRACT

The shift in international security issues toward non-traditional dimensions positions aviation security as a strategic sector within the global system. This study aims to analyze Indonesia's security diplomacy through compliance with the ICAO regime in Batam during the 2022–2025 period and its implications for international legitimacy. The method used is qualitative, employing a literature review and textual analysis based on secondary data. The results show that the implementation of standards is carried out through strengthened surveillance, enhanced security, and inter-agency coordination. This compliance reflects indirect security diplomacy as well as a strategy for building credibility. This study concludes that sustained compliance is an important instrument in strengthening Indonesia's position in the international system.

Keywords: Neo-Realisme, Security Diplomacy, International Regime, International Legitimacy, Aviation Security

PENDAHULUAN

Dinamika keamanan internasional kontemporer menunjukkan pergeseran signifikan dari fokus tradisional berbasis militer menuju isu non-tradisional yang lebih kompleks, multidimensional, dan saling terhubung. Perubahan ini mencerminkan berkembangnya bentuk ancaman yang tidak lagi bersifat konvensional, melainkan melibatkan aspek mobilitas global, teknologi, serta interdependensi antarnegara. Dalam konteks tersebut, keamanan penerbangan sipil menjadi salah satu sektor strategis yang tidak terpisahkan dari sistem mobilitas global modern. Transportasi udara tidak hanya berfungsi sebagai sarana konektivitas ekonomi dan sosial, tetapi juga sebagai ruang yang rentan terhadap berbagai ancaman keamanan lintas negara. Tingginya interkoneksi antarnegara melalui transportasi udara menciptakan ketergantungan yang membuat keamanan penerbangan tidak dapat dikelola secara unilateral oleh satu negara saja, melainkan memerlukan koordinasi dan standar bersama. Oleh karena itu, keberadaan rezim internasional seperti ICAO menjadi krusial dalam membangun kerangka normatif yang mengatur perilaku negara dalam menjaga keamanan penerbangan global (ICAO, 2022). Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap standar internasional tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga memiliki implikasi penting dalam dimensi politik dan keamanan internasional (Abeyratne, 2019).

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan tingkat mobilitas udara yang tinggi memiliki posisi strategis dalam jaringan transportasi regional dan global. Letak geografis Indonesia yang berada di jalur lalu lintas udara internasional menjadikannya sebagai salah satu simpul penting dalam sistem penerbangan global. Kondisi ini semakin kompleks di kawasan perbatasan seperti Batam yang memiliki

intensitas pergerakan lintas negara yang signifikan, terutama karena kedekatannya dengan Singapura dan Malaysia sebagai pusat mobilitas regional. Tingginya arus mobilitas tersebut tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memperbesar potensi risiko keamanan, khususnya terkait pengelolaan identitas, pengawasan perlintasan, serta ancaman lintas batas lainnya seperti penyelundupan dan kejahatan transnasional (BNPP, 2024). Dalam situasi ini, implementasi standar ICAO menjadi sangat penting sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas keamanan penerbangan sekaligus memastikan integrasi Indonesia dalam sistem keamanan global. Dengan demikian, kepatuhan Indonesia terhadap ICAO tidak dapat dipahami semata sebagai kebijakan administratif, tetapi juga sebagai respons terhadap dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks (Kementerian Perhubungan RI, 2023).

Penelitian ini berargumen bahwa kepatuhan Indonesia terhadap rezim ICAO merupakan bagian dari strategi diplomasi keamanan dalam konteks hubungan internasional. Kepatuhan tersebut tidak hanya bertujuan untuk memenuhi standar teknis, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membangun legitimasi internasional dalam sistem penerbangan global. Dalam literatur hubungan internasional, kepatuhan terhadap norma internasional sering dipahami sebagai bentuk sinyal kredibilitas negara terhadap komitmen pada tata kelola global (Finnemore & Sikkink, 2018). Melalui kepatuhan terhadap standar ICAO, Indonesia menunjukkan kesediaannya untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi global, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembentukan kepercayaan internasional terhadap sistem keamanan nasionalnya. Dengan demikian, kepatuhan terhadap ICAO memiliki dimensi strategis yang tidak hanya berkaitan dengan keamanan domestik, tetapi juga dengan posisi dan persepsi negara dalam struktur politik internasional yang lebih luas.

Meskipun demikian, kajian mengenai ICAO dalam literatur akademik masih didominasi oleh pendekatan teknis dan operasional yang berfokus pada aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. Di sisi lain, studi dalam hubungan internasional cenderung membahas rezim internasional atau isu keamanan secara umum tanpa secara spesifik mengaitkannya dengan ICAO sebagai arena interaksi politik antarnegara. Keterpisahan ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam memahami ICAO sebagai institusi yang tidak hanya mengatur standar teknis, tetapi juga membentuk norma dan ekspektasi perilaku negara dalam sistem internasional. Dengan kata lain, ICAO belum banyak dianalisis sebagai bagian dari dinamika politik global yang melibatkan kepentingan negara, proses legitimasi, dan interaksi kekuasaan. Pendekatan yang menghubungkan kepatuhan terhadap standar ICAO dengan praktik diplomasi keamanan masih relatif minim dalam literatur akademik (Barkin, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengkaji ICAO dari perspektif politik dan keamanan internasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: bagaimana Indonesia menjalankan diplomasi keamanan terhadap rezim internasional ICAO di kawasan perbatasan Batam pada periode 2022–2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap ICAO sebagai instrumen dalam kebijakan luar negeri, khususnya dalam konteks keamanan non-tradisional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara kepatuhan

terhadap standar internasional dengan upaya membangun legitimasi dan kepercayaan global. Fokus analisis diarahkan pada praktik konkret di kawasan perbatasan sebagai ruang strategis interaksi internasional, sehingga memungkinkan penelitian ini untuk menghubungkan dimensi domestik dan internasional dalam satu kerangka analisis yang terpadu.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menghubungkan perspektif neo-realisme, teori rezim internasional, dan konsep legitimasi internasional dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana negara bertindak dalam menghadapi tekanan sistem internasional sekaligus memanfaatkan rezim internasional untuk mencapai kepentingannya. Selain itu, penelitian ini memperluas kajian diplomasi keamanan dengan menempatkannya dalam konteks isu non-tradisional seperti keamanan penerbangan, yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian dalam studi hubungan internasional. Secara empiris, penelitian ini menghadirkan studi kasus Batam sebagai kawasan perbatasan dengan mobilitas tinggi yang jarang dikaji secara mendalam dalam literatur sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya pemahaman mengenai peran rezim internasional, tetapi juga menunjukkan bagaimana kepatuhan terhadap norma global dapat digunakan sebagai strategi untuk membangun kredibilitas dan legitimasi negara dalam sistem internasional (Lake, 2018).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena hubungan internasional secara kontekstual dan mendalam, khususnya dalam melihat praktik diplomasi keamanan Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap dinamika non-material seperti kepatuhan terhadap norma internasional, konstruksi legitimasi, serta pembentukan kepercayaan antarnegara. Dalam konteks ini, pendekatan tersebut relevan untuk menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap rezim ICAO sebagai bagian dari praktik diplomasi keamanan. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti menginterpretasikan makna di balik kebijakan dan tindakan negara, bukan sekadar mengidentifikasi pola empiris yang tampak (Creswell, 2018). Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara kepatuhan terhadap rezim internasional dan upaya Indonesia dalam membangun legitimasi internasional.

Penelitian ini menggunakan metode analisis tekstual terhadap data sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis tekstual dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen kebijakan, laporan organisasi internasional, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan standar dan praktik ICAO. Objek penelitian difokuskan pada Indonesia dalam menjalankan diplomasi keamanan melalui kepatuhan terhadap rezim internasional ICAO. Secara empiris, fokus analisis diarahkan pada kawasan perbatasan Batam sebagai ruang strategis implementasi kebijakan keamanan penerbangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola kebijakan sekaligus memahami makna di balik praktik kepatuhan yang dilakukan negara, sebagaimana analisis dokumen dalam studi hubungan internasional digunakan untuk menelusuri praktik dan orientasi kebijakan negara (Bowen, 2017).

Pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder sebagai sumber utama analisis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup dokumen resmi pemerintah,

laporan organisasi internasional seperti ICAO, serta berbagai publikasi yang relevan dengan isu keamanan penerbangan dan diplomasi internasional. Selain itu, sumber data juga meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, serta berita yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan praktik keamanan penerbangan di Indonesia. Pemilihan data dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi terhadap fokus penelitian dan keterkaitannya dengan kerangka analisis yang digunakan. Pendekatan ini sejalan dengan praktik penelitian kualitatif yang menekankan penggunaan berbagai sumber dokumen untuk membangun pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti (Johnston, 2017).

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan logika induktif untuk menginterpretasikan makna dari data yang telah dikumpulkan. Proses analisis dilakukan melalui tahapan pengelompokan, kategorisasi, dan interpretasi data berdasarkan tema-tema yang muncul dari hasil pengumpulan data. Analisis kemudian diarahkan untuk mengidentifikasi hubungan antara kepatuhan Indonesia terhadap standar ICAO dengan upaya membangun legitimasi internasional. Proses ini bersifat fleksibel dan berkembang seiring dengan bertambahnya data, sehingga memungkinkan penyesuaian dalam proses interpretasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Dengan demikian, pendekatan ini bertujuan menghasilkan pemahaman interpretatif mengenai makna diplomasi keamanan Indonesia dalam konteks interaksi dengan rezim internasional.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi pola pelaksanaan diplomasi keamanan Indonesia melalui kepatuhan terhadap rezim ICAO di kawasan Batam sebagai ruang strategis perbatasan internasional yang memiliki intensitas mobilitas lintas negara yang tinggi. Temuan diperoleh melalui analisis terhadap dokumen kebijakan nasional, laporan organisasi internasional, serta berbagai sumber data sekunder yang merepresentasikan praktik keamanan penerbangan dalam konteks global. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan dua dimensi utama, yaitu mekanisme pelaksanaan diplomasi keamanan dan peran kepatuhan dalam membangun legitimasi serta kepercayaan internasional. Temuan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif dengan menggunakan kerangka neo-realisme, teori rezim internasional, dan konsep legitimasi sebagai alat analisis yang saling melengkapi. Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap standar internasional dipahami sebagai strategi negara untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi global yang terus berkembang dan semakin mengikat perilaku negara dalam sistem internasional (Lake, 2016). Dengan demikian, kepatuhan terhadap ICAO tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kebijakan teknis, melainkan sebagai bagian dari praktik politik keamanan internasional yang memiliki dimensi strategis.

Mekanisme Pelaksanaan Diplomasi Keamanan Indonesia terhadap Rezim ICAO di Batam

Pelaksanaan diplomasi keamanan Indonesia terhadap ICAO di Batam diwujudkan melalui penerapan berbagai standar keamanan penerbangan internasional yang telah diadopsi ke dalam kebijakan nasional. Data menunjukkan adanya implementasi kebijakan seperti penguatan sistem verifikasi identitas penumpang, peningkatan keamanan infrastruktur bandara, serta koordinasi lintas

lembaga antara otoritas penerbangan, imigrasi, dan aparat keamanan. Kawasan Batam menjadi titik strategis karena posisinya sebagai wilayah perbatasan dengan tingkat mobilitas lintas negara yang tinggi, khususnya dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini meningkatkan kompleksitas risiko keamanan, termasuk potensi ancaman transnasional seperti penyelundupan, pemalsuan identitas, dan perlintasan ilegal. Oleh karena itu, penerapan standar ICAO di wilayah ini menunjukkan adanya upaya sistematis negara dalam membangun sistem keamanan yang adaptif dan terintegrasi. Implementasi tersebut mencerminkan bahwa negara berupaya menjaga stabilitas keamanan domestik sekaligus memenuhi ekspektasi internasional terkait keamanan penerbangan (ICAO, 2022). Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan dimensi politik keamanan yang lebih luas.

Mekanisme tersebut dapat dipahami sebagai bentuk praktik diplomasi keamanan dalam konteks isu non-tradisional yang semakin dominan dalam hubungan internasional kontemporer. Dalam perspektif neo-realisme, implementasi standar ICAO mencerminkan respons rasional negara terhadap tekanan sistem internasional yang menuntut stabilitas dan keamanan sebagai prasyarat interaksi global. Negara tidak hanya bertindak untuk kepentingan domestik, tetapi juga untuk mempertahankan posisi dan kredibilitasnya dalam struktur internasional. Di sisi lain, teori rezim internasional menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap standar ICAO merupakan bentuk internalisasi norma yang dihasilkan melalui interaksi antarnegara dalam kerangka institusional (Krasner, 2019). Melalui mekanisme ini, Indonesia tidak hanya mengamankan wilayahnya, tetapi juga menunjukkan kesediaan untuk menyesuaikan diri dengan aturan global yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan keamanan penerbangan merupakan bagian dari interaksi struktural dalam sistem internasional yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik global.

Gambar 1: Kebijakan terkait Penerapan e-Passport Republik Indonesia



Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang (2024)

Data empiris dari laporan ICAO, kebijakan nasional, dan publikasi terkait menunjukkan bahwa Indonesia secara konsisten mengadopsi dan menerapkan standar keamanan penerbangan internasional dalam praktiknya. Konsistensi ini terlihat dari peningkatan kapasitas keamanan bandara, penggunaan teknologi identifikasi yang lebih canggih, serta evaluasi berkala terhadap sistem keamanan yang diterapkan. Kebijakan yang diambil tidak bersifat reaktif atau sementara, melainkan merupakan bagian dari strategi jangka panjang negara dalam menjaga stabilitas sektor penerbangan. Konsistensi ini mencerminkan kepentingan negara dalam mempertahankan reputasi internasional dan menghindari potensi risiko yang dapat merugikan posisi strategisnya dalam sistem global (Buzan & Hansen, 2020). Dengan demikian, kepatuhan terhadap standar ICAO tidak hanya merupakan kewajiban normatif, tetapi juga merupakan pilihan rasional yang berorientasi pada kepentingan nasional. Dalam konteks ini, kepatuhan menjadi instrumen yang menghubungkan kebijakan domestik dengan tujuan politik eksternal negara.

Kepatuhan Rezim ICAO sebagai Strategi Pembangunan Legitimasi dan Kepercayaan Internasional

Kepatuhan Indonesia terhadap standar ICAO terbukti berkontribusi pada pembentukan legitimasi internasional dalam sistem keamanan penerbangan global. Data menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan terhadap sistem keamanan penerbangan Indonesia yang tercermin dari pengakuan terhadap standar keselamatan dan keamanan yang diterapkan. Kepatuhan ini menjadi indikator penting kredibilitas negara dalam menunjukkan komitmennya terhadap norma internasional. Legitimasi internasional dalam konteks ini tidak terbentuk secara otomatis, melainkan melalui proses berkelanjutan yang melibatkan kepatuhan terhadap aturan dan standar global yang diakui bersama (Tallberg & Zürn, 2019). Gambaran empiris mengenai capaian tersebut dapat dilihat pada tabel 1 yang menunjukkan posisi Indonesia dalam standar keamanan penerbangan global.

Tabel 1: Perbandingan Antara Pencapaian Indonesia Dengan Target Dan Rata-Rata Global

Parameter	Nilai	Sumber Data
Capaian Indonesia (2024)	88,53%	Laporan Hasil Audit USAP-CMA ICAO (Kemenhub RI, 2024)
Target GAsEP 2027	75,00%	ICAO Global Aviation Security Plan (GAsEP)
Status Temuan SSeC	0 (Nol)	Pernyataan Penutup Audit ICAO 2024

Sumber: Kementerian Perhubungan RI, ICAO (2024)

Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ICAO dapat dipahami sebagai mekanisme strategis yang memungkinkan negara memperoleh penerimaan dalam sistem internasional. Dengan demikian, kepatuhan tidak hanya berfungsi sebagai alat regulasi, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi keamanan yang efektif. Praktik kepatuhan ini juga menunjukkan bagaimana negara mengelola kepentingan nasionalnya melalui penyesuaian terhadap norma global yang berlaku. Dalam konteks ini,

keberhasilan implementasi standar internasional tidak hanya berdampak pada aspek teknis keamanan, tetapi juga pada dimensi politik yang berkaitan dengan reputasi dan posisi negara. Hal ini memperlihatkan bahwa kepatuhan memiliki nilai strategis dalam memperkuat kepercayaan serta hubungan antarnegara secara berkelanjutan.

Dalam kerangka legitimasi internasional, kepatuhan terhadap norma global berperan penting dalam meningkatkan penerimaan terhadap suatu negara dalam sistem internasional. ICAO sebagai rezim internasional berfungsi membentuk ekspektasi perilaku negara melalui standar yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Kepatuhan Indonesia terhadap standar tersebut mencerminkan upaya untuk memperoleh pengakuan sebagai negara yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan penerbangan global. Proses ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan internasional terhadap sistem keamanan nasional Indonesia. Legitimasi yang terbentuk melalui kepatuhan ini tidak hanya berdampak pada sektor penerbangan, tetapi juga memengaruhi persepsi global terhadap stabilitas dan kapasitas negara dalam mengelola keamanan (Suchman, 2017). Dengan demikian, hubungan antara kepatuhan dan legitimasi bersifat timbal balik, di mana kepatuhan menghasilkan legitimasi, dan legitimasi memperkuat posisi negara dalam sistem internasional.

Kepatuhan Indonesia terhadap ICAO juga dapat dijelaskan melalui perspektif neo-realisme sebagai tindakan rasional negara dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya. Negara cenderung mematuhi rezim internasional ketika kepatuhan tersebut memberikan keuntungan strategis, seperti peningkatan keamanan, stabilitas sistem, dan pengakuan internasional. Dalam hal ini, ICAO menyediakan kerangka yang mengatur perilaku negara dalam sektor penerbangan global sekaligus menciptakan stabilitas dalam interaksi internasional. Kepatuhan terhadap rezim tersebut mencerminkan kombinasi antara kepentingan nasional dan adaptasi terhadap struktur sistem internasional yang menuntut koordinasi dan standar bersama (Keohane, 2018). Dengan demikian, kepatuhan Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dalam mempertahankan posisi negara dalam sistem internasional yang kompetitif.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi keamanan tidak selalu diwujudkan dalam bentuk negosiasi formal antarnegara. Kepatuhan terhadap rezim internasional dapat berfungsi sebagai bentuk diplomasi tidak langsung yang memiliki dampak signifikan dalam membangun posisi negara di tingkat global. Melalui kepatuhan terhadap standar ICAO, Indonesia membangun citra sebagai aktor yang kredibel dan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan penerbangan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi keamanan dapat berlangsung melalui praktik kebijakan domestik yang terintegrasi dengan norma global. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai diplomasi keamanan dalam studi hubungan internasional, khususnya dalam konteks isu non-tradisional yang semakin berkembang (Adler & Pouliot, 2017). Dengan demikian, kepatuhan terhadap ICAO dapat dipahami sebagai strategi legitimasi yang efektif dan relevan dalam dinamika politik global kontemporer.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kepatuhan terhadap rezim internasional, praktik diplomasi keamanan, dan pembentukan legitimasi internasional. Mekanisme implementasi di kawasan Batam menjadi contoh konkret bagaimana

kebijakan nasional dapat berfungsi sebagai instrumen diplomasi dalam konteks global. Temuan ini mengisi celah penelitian sebelumnya yang cenderung melihat ICAO hanya dari aspek teknis dan operasional, tanpa mempertimbangkan dimensi politik dan keamanan yang melekat di dalamnya. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam melihat rezim internasional sebagai arena interaksi politik yang dinamis. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap norma internasional dapat menjadi strategi yang efektif dalam memperkuat posisi negara dalam sistem internasional (Finnemore & Sikkink, 2016). Oleh karena itu, kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengembangan konsep diplomasi keamanan dalam konteks kepatuhan terhadap rezim internasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi keamanan Indonesia terhadap rezim ICAO di Batam dijalankan melalui kepatuhan terhadap standar internasional. Kepatuhan tersebut berfungsi sebagai strategi membangun legitimasi dan kepercayaan global. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan merupakan praktik diplomasi tidak langsung yang bersifat strategis (Tallberg & Zürn, 2019).

Secara teoritis, penelitian ini memperluas kajian diplomasi keamanan dalam isu non-tradisional dengan menghubungkan neo-realisme, rezim internasional, dan legitimasi. Secara praktis, temuan ini menunjukkan pentingnya kepatuhan sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan data sekunder, sehingga membuka peluang penelitian lanjutan berbasis data empiris yang lebih mendalam (Creswell, 2018).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan secara konsisten selama proses penelitian berlangsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh sivitas akademika Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian ini. Selain itu, penulis turut mengapresiasi dukungan moral dari keluarga serta rekan-rekan yang telah memberikan semangat dan bantuan selama proses penyusunan penelitian. Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga publik, komersial, maupun nirlaba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeyratne, R. (2019). *Legal and regulatory issues in international aviation*. Springer.
- Adler, E., & Pouliot, V. (2017). International practices. *International Theory*, 9(1), 1–36.
- Barkin, J. S. (2017). *International organization: Theories and institutions*. Palgrave Macmillan.
- Buzan, B., & Hansen, L. (2020). *The evolution of international security studies* (updated ed.). Cambridge University Press.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (2018). International norm dynamics and political change. *International Organization*, 72(4), 887–917.
- International Civil Aviation Organization (ICAO). (2022). *Annual report of the Council 2022*. ICAO.
- International Civil Aviation Organization (ICAO). (2023). *Global aviation security plan (GASeP)*. ICAO.
- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang. (2024). *Paspor Biasa Atau Paspor Elektronik, Pilih Mana?*.
<https://kupang.imigrasi.go.id/paspor-biasa-atau-paspor-elektronik-pilih-mana/>
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2023). *Laporan kinerja sektor transportasi udara*. Kemenhub RI.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2024). *Hasil Audit ICAO : Keamanan Penerbangan Indonesia Di Atas Rata-rata Dunia*.
<https://hubud.kemenhub.go.id/hubud/website/berita/4670>
- Keohane, R. O. (2018). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy* (Updated ed.). Princeton University Press.
- Krasner, S. D. (2019). *International regimes*. Cornell University Press.
- Lake, D. A. (2016). Authority, coercion, and power in international relations. *International Studies Quarterly*, 60(1), 1–10.
- Lake, D. A. (2018). *Hierarchy in international relations*. Cornell University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Suchman, M. C. (2017). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 42(3), 571–610.
- Tallberg, J., & Zürn, M. (2019). The legitimacy and legitimation of international organizations. *Review of International Organizations*, 14(4), 581–606.